

RENCANA AKSI BPPKAD KOTA PROBOLINGGO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang memiliki Kevalidan Data Aset				82
		Persentase OPD dengan LKPD yang sesuai ketentuan	100			
		Persentase OPD dengan realisasi di atas 90%				65
2	Meningkatnya Pendapata Asli Daerah (PAD)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				11,88

NO	PROGRAM			KEGIATAN			AKSI	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
	NAMA	INDIKATOR	TARGET	NAMA	INDIKATOR	TARGET		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah	85%	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terinventarisir	85%	Penyusunan buku inventarisasi aset daerah		√	√	√
							Pemrosesan Tuntutan Ganti Rugi	√	√	√	√
							Rekonsiliasi laporan aset masing-masing OPD	√	√	√	√
							Bimbingan Teknis Pemantapan Kapasitas Pengurus Barang OPD		√		√
							Penyusunan Penghapusan Barang Milik Daerah	√	√	√	√
				Perencanaan Barang Milik Daerah	Persentase Perencanaan BMD yang sesuai kebutuhan	82%	Penyusunan Perwali Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD	√		√	
							Pelaksanaan Pemindahtanganan BMD	√	√	√	√
							Pembuatan Perwali Penghapusan	√			
							Pelaksanaan/ Pembuatan Perjanjian Pinjam Pakai	√	√	√	√

				Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase tanah dan bangunan yang disertifikat	6%	Pengadaan Patok Tanda Batas Tanah Aset	√	√	√	√
					Persentase Tanah dan Bangunan yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya	89%	Pensertifikatan Tanah dan Bangunan	√	√	√	√
							Pengelolaan Pemanfaatan Sewa Tanah Pertanian	√	√	√	√
							Pengadaan Papan Identitas Tanah dan Bangunan			√	√
2	Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah menyelesaikan Laporan Keuangan yang berkualitas	90%	Pengembangan Manajemen Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan proses akuntansi pendapatan dan pembiayaan sesuai standar	8 OPD	Pendampingan akuntansi pendapatan dan pembiayaan	√	√	√	√
							Penyusunan laporan piutang daerah		√	√	
							Penyusunan laporan hutang daerah		√	√	
							Penyusunan laporan pembiayaan daerah		√	√	
				Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah dan PPKD yang akuntabel	8 L/K	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	√	√	√	√
							Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (unaudited)	√			
							Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (audited)		√		
							Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD		√		
							Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD		√		
							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	√	√	√	√

							Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis		√		
3	Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase Perencanaan Anggaran OPD yang berkualitas	100%	Anggaran Belanja Langsung	Jumlah PD yang menyusun rencana anggaran belanja langsung tepat waktu	28 PD	Menghimpun dan menelaah petunjuk teknis/pedoman penyusunan penjabaran APBD	√	√	√	√
							Rakor penyusunan penjabaran APBD dengan SKPD	√	√	√	√
							Memantau dan mengevaluasi penyusunan penjabaran APBD	√	√	√	√
							Rakor penyusunan Rencana Kerja Anggaran		√	√	√
							Memantau dan mengevaluasi penyusunan RKA SKPD/PPKD sesuai dengan perencanaan		√	√	√
							Rakor penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran		√	√	√
							Memantau dan mengevaluasi penyusunan DPA dan SKPD/PPKD sesuai dengan penjabaran APBD		√	√	√
							Menghimpun dan menelaah petunjuk teknis/pedoman penyusunan APBD	√	√	√	√
							Rakor penyusunan APBD dengan SKPD	√	√	√	√
							Memantau dan mengevaluasi penyusunan APBD	√	√	√	√
							Melaksanakan fasilitasi pendampingan dengan TAPD dalam rangka penyusunan APBD	√	√	√	√
				Anggaran Pendapatan, Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung	Persentase rincian anggaran pendapatan dan pembiayaan yang telah disinkronkan dengan kebijakan terkait	100%	Menghimpun dan menelaah petunjuk teknis / pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD	√	√	√	√
							Rakor penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS	√	√		

						Penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS		√			
						Menindaklanjuti KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS sesuai hasil pembahasan dan rekomendasi badan anggaran			√		
						Rakor penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pembiayaan dan Belanja Tidak Langsung		√	√	√	
				Jumlah perangkat daerah yang menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung tepat waktu	28	Memantau dan mengevaluasi penyusunan anggaran pendapatan pembiayaan dan belanja tidak langsung		√	√	√	
						Melaksanakan fasilitasi pendampingan dengan TAPD dalam rangka penyusunan APBD	√	√	√	√	
4	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang terkendali	100%	Pengelolaan Kas	Persentase Laporan DTH RTH tepat waktu	60%	Rekon DTH dengan seluruh SKPD	√	√	√	√
						Penyusunan Laporan RTH BUD	√	√	√	√	
					Persentase Ketepatan Laporan Posisi Kas Harian	90%	Rekap bukti penerimaan dan pengeluaran	√	√	√	√
						Rekon penerimaan dan pengeluaran harian dengan Bank Jatim	√	√	√	√	
						Rekon penerimaan bulanan dengan SKPD penghasil	√	√	√	√	
				Persentasi Potensi PAD dari penempatan Dana Daerah	80%	Rapat koordinasi penempatan deposito	√				
						Rekap pendapatan bunga deposito	√	√	√	√	

Perbendaharaan	Persentase ketepatan penatausahaan keuangan antara SKPD dan SKPKD	75%	Rekonsiliasi Laporan Perbendaharaan per bulan	√	√	√	√
	Persentase GNNT di Pemkot Probolinggo	75%	Rekonsiliasi implementasi transaksi non tunai (triwulan)		√		√
	Persentase ketepatan penatusahaan keuangan non RKUD	75%	Rekonsiliasi Realisasi Dana non RKUD (Triwulan)	√	√	√	√
	Persentase ketepatan penerbitan SP2D	85%					
	Persentase ketepatan penerbitan SP2B	75%			√		√
Pengelolaan Belanja Tidak Langsung	Persentase Ketepatan Pengelolaan Penerbitan SP2D Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Melaksanakan rekonsiliasi atas mutasi gaji ASN setiap tahun	√	√	√	√
			Melaksanakan rekonsiliasi pembayaran PFK dengan lembaga terkait	√	√	√	√
	Persentase Ketepatan Pengelolaan Penganggaran Gaji dan Tunjangan CPNS	100%	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas pembuat daftar gaji se-kota Probolinggo	√	√	√	√
	Persentase Ketepatan Pengelolaan Hibah Daerah	100%	Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah bansos	√	√	√	√
	Persentase Ketepatan Pengelolaan Bantuan Sosial Daerah	100%	Melaksanakan penelitian kelengkapan pengajuan bansos tidak direncanakan (santunan kematian)	√	√	√	√

							Mengadakan sosialisasi peraturan, mekanisme dan peratnggungjawaban hibah bansos kepada Lembaga Penerima Hibah Bansos				√	
							Melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan pengelolaan BTL	√	√	√	√	
5	Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	11%	Pelayanan, Penetapan, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP yang mendapatkan penetapan tarif	45 WP	Pendataan potensi WP baru	√	√	√	√	
							Penetapan tarif baru	√	√	√	√	
						Jumlah penerbitan NPWPD WP baru	50 WP	Pelayanan penerbitan NPWPD	√	√	√	√
					2,6%		Sosialisasi pemasangan alat monitoring pajak daerah	√				
						Jumlah WP yang membayar tepat waktu	1.500 WP	Pelayanan pajak daerah	√	√	√	√
					Penagihan pajak daerah			√	√	√	√	
					Uji petik pajak daerah			√	√	√	√	
						Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan	Persentase Realisasi Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan	100%	Monitoring realisasi belanja atas dana perimbangan dan pendapatan lain-lain	√	√	√
6	Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB	Persentase peningkatan penerimaan PBB dan BPHTB	4,76%	Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB	Jumlah obyek pajak yang dimutakhirkan	800 OP	Sosialisasi pemutakhiran PBB terkait pelayanan PBB	√	√	√		
							Pemutakhiran PBB melalui RT/RW	√	√	√		
							Pemutakhiran PBB secara kolektif untuk perumahan	√	√	√		
							Pemutakhiran obyek pajak individu	√				

	Berkas pelayanan PBB dan BPHTB yang diselesaikan	100%	Sosialisasi pelayanan BPHTB		√	√	
			Melaksanakan pelayanan PBB dan BPHTB	√	√	√	√
			Mengarsipkan berkas pelayanan PBB dan BPHTB	√	√	√	√
Penagihan dan Pengolah Data PBB dan BPHTB	Jumlah SPPT dan DBHKP PBB yang diterbitkan dan didistribusikan	69.683 SPPT	Rakor pendistribusian SPPT bersama Kelurahan	√			
			Sosialisasi pendistribusian SPPT kepada RT dan RW	√			
			Penyerahan/ distribusi SPPT PBB kepada RT dan RW	√	√		
			Rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB	√	√		
			Penyusunan dokumen laporan hasil sosialisasi dan rekonsiliasi pendistribusian SPPT PBB	√	√		
Jumlah data digital dan data spasial yang direkonsiliasi	1800 OP	Pelaksanaan perekaman data digital (SISMOP/ basis data PBB) atas perubahan data obyek dan subyek pajak	√	√	√	√	
		Menyusun berita acara perekaman data	√	√	√	√	
		Menyusun rekapitulasi hasil perekaman data	√	√	√	√	
		Pelaksanaan perekaman data spasial (SIG PBB) atas perubahan peta blok	√	√	√	√	
		Menyusun rekapitulasi hasil perekaman data spasial	√	√	√	√	
Persentase kesesuaian data penerimaan PBB dan BPHTB	72.650 data	Melakukan rekonsiliasi elektronik harian atas penerimaan PBB dan BPHTB	√	√	√	√	
		Menyusun rekapitulasi penerimaan PBB dan BPHTB hasil rekonsiliasi elektronik	√	√	√	√	

				Nilai realisasi penerimaan PBB dan BPHTB 15,78 M	Melakukan pemungutan PBB se kota Probolinggo Melaksanakan kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB Melaksanakan kegiatan Road Show Pembayaran PBB Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi realisasi PBB dan BPHTB dengan pemungut dan PPAT	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓
				Nilai Piutang yang terselesaikan 694 juta	Melakukan kegiatan uji petik Melakukan penagihan atas piutang Melaksasnakan kegiatan pemutakiran piutang	 	 	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓

Probolinggo, Januari 2020
 Plt. Kepala BPPKAD Kota Probolinggo



Dra. HERI ASTUTI, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP.19640703 199003 2 012